

**PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM
PEMBANGUNAN NAGARI**
**(Studi di Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah
Melintang Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

ABDIANA ILOSA
2006/79333
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PADANG
2010

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peranan Pemimpin Informal dalam Pembangunan Nagari
(Studi Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang
Kab. Pasaman Barat)

Nama : Abdiana Ilosa

NIM : 2006/79333

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Januari 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd
Nip.195110051980101001

Pembimbing II

Drs. Syamsir, M.Si
Nip. 196304011989031003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat 7 Januari 2011 pukul 08.00 s/d 09.00 WIB

Peranan Pemimpin Informal dalam Pembangunan Nagari (Studi Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)

Nama : Abdiana Ilosa
NIM : 2006/79333
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Januari 2011

Tim Penguji:

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd	_____
2. Sekretaris:	Drs. Syamsir, M.Si	_____
3. Anggota :	Drs. Nurman. S, M.Si	_____
4. Anggota :	Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	_____

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA.
NIP.196107201986021001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBANGUNAN NAGARI(Studi di Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”**. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si dan Dra. Aina selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik

3. Drs. Karjuni Dt. Maani M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan pembimbing akademik
4. Bapak Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Drs. Syamsir, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi, dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Drs. Nurman.S. M.Si, Ibu Dra. Hj. Maria Montessori, M.Ed. M. Si dan Ibu Dra. Fitri Eriyanti. M.Pd, Ph.D selaku tim penguji yang telah memberikan masukan, saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini..
7. Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan yang bernilai.
8. Bapak, Ibu serta Kakak yang berada di KAN yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data, wawancara dan lain-lain sampai skripsi ini berhasil diselesaikan.
9. Para anggota ninik mamak, alim ulama,cerdik pandai serta beberapa masyarakat Kenagarian ujung Gading.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta: Bapak Sabaruddin, S.Pd dan Ibu Syamsi Animar S.Pd yang telah memberikan doanya serta bantuan moril dan materil dalam menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, serta adikku Anita Bella, Azanul Fajar Tanjung, dan Hafiza Hanesti terimakasih buat

dukungan dan doanya, serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, semangat, serta dorongan itulah saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

11. Rekan-rekanku program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2006, terimakasih atas segala kebaikannya.
12. Semua teman-temanku yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 7 januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	7
E. Fokus Penelitian	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Kajian Teoris	10
1. Pengertian Peranan	10
2. Kepemimpinan Informal dan hubungan dengan masyarakat	14
3. Profil Kepemimpinan Informal di Minangkabau	18
4. Pembangunan Nagari	21
B. Kerangka Konseptual	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian	30
D. Jenis, teknik dan alat Pengumpulan Data	31
E. Uji Keabsahan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
a. Letak geografis Kenagarian Ujung Gading	39
b. Kependudukan	40
c. Agama	40

d. Pendidikan	41
e. Keadaan sosial	42
f. Perekonomian	43
g. Kebudayaan	44
h. Adat	46
2. pemerintahan nagari ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat	48
a. Pemerintahan Nagari	44
b. Ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai	53
B. Temuan Penelitian	57
1. Peranan Pemimpin Informal dalam Pembagunan Nagari	57
a. Pembangunan dalam segi fisik	57
b. Pembangunan dalam segi non fisik	60
1. Agama	60
2. Ekonomi	62
3. Adat	65
2. Hubungan Pemimpin Informal dengan Masyarakat dalam Pembangunan	68
C. Pembahasan	70
1. Peranan Pemimpin Informal dalam Pembagunan Nagari	70
a. Pembangunan dalam segi fisik	72
b. Pembangunan dalam segi non fisik	74
1. Agama	74
2. Ekonomi	78
3. Adat	79
2. Hubungan Pemimpin Informal dengan Masyarakat dalam Pembangunan	79
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Hak tersebut diperoleh daerah melalui penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintahan atau daerah tingkat atas melalui desentralisasi sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan (Djohermansyah Djohan. 1990:52).

Seiring dengan dikeluarkanya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Maka Pemerintah Daerah Sumatra Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat No 2 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang berlaku untuk seluruh kabupaten di Sumatra Barat kecuali Mentawai. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat No 2 tahun 2007 menyatakan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah propinsi Sumatra Barat.

Berdasarkan hal diatas maka dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat menindaklanjutinya dengan

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 tahun 2008 menyatakan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu, dan berwewenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah propinsi Sumatra Barat.

Nurdin Yakub (1995: 36) menyatakan bahwa nagari tidak ada hubungan satu sama lain dan bebas sama sekali. Nagari juga bebas membuat peraturan-peraturan dan bebas menjalankannya, tetapi lembaga-lembaga tetap berlaku untuk semua. Nagari-nagari dipimpin oleh penghulu-penghulu secara demokratis berdasarkan kata mufakat dan merupakan republik-republik kecil. Rakyat sangat setia pada adat dan tradisi.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan ungkapan di atas berarti sebuah nagari itu mempunyai hak dan wewenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri dan melaksanakan pembangunan nagari dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada dalam nagari. Kemudian berhak juga memiliki pemimpin masing-masing. Hal ini menandakan begitu pentingnya seorang pemimpin dalam pembangunan sebuah nagari terutama pemimpin informal dalam nagari.

Disamping itu pembangunan di daerah mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut kemajuan dan kesejahteraan sebagian besar rakyat

Indonesia. Dikatakan demikian karena sebagian besar rakyat Indonesia berada di daerah dengan tingkat sosial ekonomi yang sangat rendah, sehingga apabila pembangunan berhasil dilaksanakan di nagari berarti telah mencakup sebagian besar kepentingan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pembangunan nagari perlu ditingkatkan kemampuan pemimpin untuk turut serta secara spontan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang dianggap kurang baik kearah keadaan yang lebih baik. Dalam kegiatan pembangunan di nagari , sangat dibutuhkan pimpinan-pimpinan yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat atau orang-orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk turut berperanan dalam kegiatan pembangunan.

Masyarakat nagari di samping memiliki pemimpin-pemimpin formal, dijumpai pula kelompok orang-orang yang memiliki pengaruh dan daya kepengikutkan yang besar di dalam masyarakat. Mereka ini merupakan produk sosial budaya masyarakat dimana eksistensi mereka didukung oleh legitimasi yang diberikan oleh masyarakat. Mereka-mereka ini dikenal sebagai pemimpin-pemimpin informal, yaitu ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Mereka terlahir karena integritas pribadi disamping substansinya berupa faktor usia, kewibawaan, dan kearifan dengan titik berat karakteristik dibidang tertentu. (Nirwan, 1979 : 17).

Selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Handayaningrat (1982 : 70), pemimpin yang bersifat informal dapat mempunyai pengaruh yang kuat

terhadap kegiatan individu maupun kelompok dalam organisasi yang formal, namun sebaliknya ia juga dapat menghalangi kegiatan-kegiatan individu maupun kelompok sebagai suatu keseluruhan dalam organisasi yang formal mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengikutnya. Oleh karena itu pemimpin yang bersifat formal harus memperhatikan atau memberi perhatian terhadap mereka, agar tidak adanya hambatan atau berusaha agar dapat melancarkan tugas pekerjaan.

Bertolak dari pengertian di atas, diakui bahwa fungsi-fungsi pemimpin informal adalah mengatur usaha-usaha pembangunan dalam masyarakat. Namun sampai dimana pemimpin informal dapat mempengaruhi masyarakat dalam usaha pembangunan, tergantung dari pada legitimasi yang dimiliki, karena legitimasi kepemimpinan adalah pedoman dan dianggap sahnya kekuasaan oleh orang-orang yang dikuasainya. (Ismail, 1976 : 18).

Dengan demikian dalam situasi kepemimpinan, maka landasan yang dapat mengkomunikasikan pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya adalah pemimpin informal. Pemimpin informal memiliki landasan seperti tersebut di atas. Dengan melihat potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin informal yang legitimasinya diberikan oleh masyarakat, maka tentunya mereka dapat mempengaruhi peranan masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Badudu-Zain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 kepemimpinan di Minangkabau yaitu tungku tigo sajarangan: (1) Ninik Mamak, yaitu orang-orang tua kepala adat di Minangkabau (Sumatera Barat);

orang yang paham akan adat istiadat; para penghulu adat, (2) Alim Ulama, yaitu orang-orang alim; para ulama Islam; para kyai, (3) Cadiak Pandai (cerdik pandai), yaitu kaum terpelajar, intelektual. Ketiga pemimpin ini menjadi pemimpin informal dalam sebuah nagari di Minangkabau.

Peranan pemimpin informal merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pembangunan, karena pemimpin informal lah yang lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Keikutsertaan pemimpin informal di dalam proses pembangunan nagari dapatlah dilihat dari beberapa faktor, antara lain : (1) Keterlibatan aktif atau peranan pemimpin informal dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan, arah strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah, (2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan, (3) Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. (Tjokroamidjojo. 1987 : 210).

Sehubungan dengan pendapat di atas apabila dilihat peranan pemimpin informal dalam pembangunan nagari di Kenagarian Ujung Gading Lembah Melintang Pasaman Barat belum terwujud sebagaimana mestinya. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa anggota pemimpin informal dan pemimpin formal serta warga masyarakat yang menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut: (1) Kurang adanya sumbangsih pikiran dalam kegiatan pembangunan Nagari , (2) Kurang adanya sumbangsih tenaga dalam kegiatan pembangunan Nagari (3) Kurang adanya rasa tanggung jawab masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan, (4)

Kurang adanya sumbangan materi dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. (hasil observasi awal tanggal 7 april 2010).

Gejala-gejala tersebut di atas dipengaruhi oleh kurangnya keterlibatan pemimpin informal dalam pembangunan nagari dari segi fisik yang dapat dilihat melalui fenomena-fenomena sebagai berikut : (1) Kurang adanya kerjasama antara pemimpin formal dengan pemimpin informal dalam pemangunan nagari dari segi fisik, (2) Kurang adanya kemampuan pemimpin informal untuk dapat mempengaruhi masyarakat, (3) Kurang adanya pengarahan-pengarahan atau petunjuk-petunjuk dari pemimpin informal kepada masyarakat.

Gejala-gejala tersebut di atas saling berhubungan satu sama lainnya sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Nagari, di Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melitang Kabupaten Pasaman Barat .”**

B. Identifikasi Masalah.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurang berperannya pemimpin informal dalam pembangunan nagari dari segi fisik di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.

2. Kurang adanya sumbangan fikiran, tenaga, serta tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nagari di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.
3. Kurang adanya kerjasama antara pemimpin informal, pemimpin formal, serta masyarakat dalam pembangunan nagari di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.
4. Kurang adanya pegarahan-pengarahan yang diberikan oleh pemimpin informal terhadap masyarakat tentang pentingnya pembangunan nagari di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.
5. Pemimpin formal kurang menjalin kerjasama yang baik dengan pemimpin informal di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terfokus dan karena berbagai keterbatasan, maka penelitian skripsi ini penulis batasi hanya pada peranan pemimpin informal dalam pembangunan nagari

D. Perumusan Masalah.

1. Bagaimana peranan pemimpin informal dalam pembangunan di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat
2. Bagaimana jalinan hubungan antara pemimpin informal dengan masyarakat dalam pembangunan nagari di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat .

E. Fokus Penelitian.

Agar penelitian ini lebih terfokus, tidak mengambang dan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, serta untuk mempertajam pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan, maka penulis akan membatasi pembahasan tentang :

1. Peranan pemimpin informal dalam pembangunan di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat .
2. Jalinan hubungan antar pemimpin informal dengan masyarakat dalam pembangunan nagari di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat .

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan bagaimana peranan pemimpin informal dalam pembangunan di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat .
2. Untuk mendeskripsikan jalinan hubungan antar pemimpin informal dengan masyarakat dalam pembangunan nagari di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat .

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat pada penelitian ini dibedakan atas dua manfaat teoritis dan manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pembangunan nagari.
- b). Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara tentang peranan pemimpin informal dalam pembangunan nagari bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik khususnya dan masyarakat pada umumnya, khususnya mata kuliah pemerintahan nagari.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan bagi pemimpin informal di Kenagarian Ujung Gading sehingga di harapkan pamimpin informal dalam kenagarian tersebut ikut berperan dalam setiap pembangunan nagari di Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.
- b) Sebagai rujukan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti tentang peranan pemimpin informal dalam pembangunan nagari secara lebih mendalam.

BAB II

KAJIAN PERPUSTAKAAN

A. Kajian teori.

1. Pengertian peranan.

Peranan merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan (status). Sedangkan status atau kedudukan biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban sehingga, apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan (Paul B Horton 1984: 118).

Mempelajari peran sekurang-kurangnya melibatkan dua aspek yaitu: (1) kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak suatu peran, (2) kita harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut. Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan : (1) ketentuan peranan, (2) gambaran peranan, dan (3) harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peranan

adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya (Berlo dalam Paul B Horton 1984: 130).

Guna mendapatkan gambaran jelas tentang peranan maka dalam hal ini akan diberikan beberapa pengertian peranan dari para ahli :

a. Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia (1991:753),

Peranan adalah “sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa “.

b. Menurut Soerjono Soekanto (1999:237), bahwa yang dimaksud

dengan peranan (role) adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut merupakan peranan.

c. Menurut Soekanto (1985:4), mengatakan bahwa Peranan adalah hak

dan kewajiban yang bersifat sukarela walaupun tidak terlalu mudah untuk menetapkan apakah secara substansial peranan merupakan hak dan kewajiban, oleh karena itu dipergunakan istilah authority atau auto power bagi kedudukan informal.

d. Menurut Koentjaraningrat (1991:119), Peranan adalah merupakan

segala cara perilaku individu atau kelompok untuk memenuhi kewajiban dan dengan demikian merupakan aspek yang dinamis dari status, cara-cara perilaku tersebut disebut Peranan.

Edy Suhardono dalam bukunya Teori Peran, Konsep Devirasi dan Implikasinya (1994:10) mengatakan bahwa :

Sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlakukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya menunjuk pada perilaku yang mengandung keharusan (oughtness, shouldness) untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata (convert) disebut sebagai norma, sedang yang dianut secara kasat mata adalah tuntutan (demand).

Dengan demikian, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses. Jadi tepatnya dapat dikatakan bahwa peranan adalah seperangkat harapan yang diinginkan dari individu atau kelompok agar melakukan sesuatu yang hasilnya dirasakan berguna bagi kepentingan bersama.

Berdasarkan pengertian diatas dijelaskan bahwa untuk dapat memainkan peranannya, maka seseorang terlebih dahulu harus dikaitkan dengan fungsi dari statusnya.

Menurut Soerjono Soekanto (1999 : 269) peranan paling sedikit mencakup tiga hal yaitu:

- a) Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam artian merupakan rangkaian-rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur dan membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat.
- c) Peranan juga dapat diartikan perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Menurut Margono Slamet (1983) mengemukakan bahwa ada empat ciri-ciri peranan yang harus dilakukan oleh lembaga dalam membantu keberhasilan suatu kegiatan :

1. Peranan yang dilakukan untuk kelangsungan pembagunan.
2. Peranan yang belum dilakukan.
3. Peranan yang akan dilakukan telah diketahui tapi belum ada pelaksanaannya.
4. Perana yang telah terlaksana.

Sehubungan dengan empat ciri diatas maka pemimpin itu berperan sebagai berikut:

1. Pemberi informasi
2. Pemberi motivasi
3. Pelancar proses difusi
4. Penghubung antar sistem
5. Pembimbing dan penggerak masyarakat ke arah yang diinginkan.

Dari pengertian diatas kaitannya dengan pemimpin informal dalam pembangunan masyarakat nagari , kata “peranan” mempunyai arti bahwa pemimpin informal menjadi suatu bagian dalam kehidupan masyarakat yang diharapkan dapat menjadikan tempat meminta masukan serta saran bagi masyarakat nagari dalam penyelenggaraan pembangunan nagari

yang sesuai dengan falsafah Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

2. Kepemimpinan informal dan hubungannya dengan masyarakat

Dewasa ini pembangunan yang dilaksanakan di daerah perkotaan maupun Pedesaan/ Nagari pada hakekatnya merupakan suatu usaha perubahan dari keadaan yang dianggap kurang baik kearah keadaan yang dianggap lebih baik. Akan tetapi usaha-usaha perubahan tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan karena sering kali kurang dimengerti dan kurang diterima oleh anggota masyarakat. Menghadapi kenyataan demikian, pemerintah melaksanakan berbagai upaya agar pembangunan dapat berhasil dengan baik, antara lain mengusahakan agar semua aktivitas pembangunan negara harus datang dari bawah karena pembangunan bermaksud membangun rasa tanggung jawab masyarakat itu sendiri (Mochtar Naim :2008).

Hal ini bisa dimengerti karena di satu sisi tugas dan peranan pemerintah dirasakan semakin berat dan disisi lain bahwa masyarakat tersebutlah yang lebih mengerti akan kebutuhan nagari nya. Untuk itu diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan harus semakin luas dan merata dan memikul beban pembangunan, bertanggung jawab atas pelaksanaannya maupun pemeliharaannya.

Dalam keadaan seperti ini diperlukan unsur-unsur penggerak yang ada pada lapisan masyarakat terbawah yang tidak saja memiliki kemampuan sumber daya yang ada, akan tetapi diharapkan pula memiliki

kemampuan untuk menggerakkan masyarakat itu sendiri yakni mereka yang dianggap sebagai pimpinan, karena mereka ini yang mempunyai pengaruh, daya dorong dalam rangka motivasi untuk pembaharuan. (Tjokroamidjojo, 1986 : 63).

Dalam pelaksanaan pembangunan nagari, tanggung jawab penuh terletak pada pimpinan itu sendiri, baik pimpinan formal maupun informal. Bagi negara yang anggota masyarakatnya masih bersifat tradisional, emosional dan paguyuban, maka pimpinan informal mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menggerakkan anggota masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena hubungan pribadi antara pemimpin dan mereka yang dipimpin sangat erat dan dihargai.

Pemimpin informal ini biasanya timbul dengan spontan karena memancarkan sifat-sifat kepemimpinan yang sungguh-sungguh seperti : (a) Kemampuan untuk mengikat hati orang lain, (b) Dapat menempatkan dirinya dengan bawahan dalam hubungan yang serasi, (c) menguasai organisasi dan tujuan yang baik, (d) Memiliki teknik-teknik kepemimpinan yang baik, (e) Memiliki kelebihan-kelebihan daya phsykis dan mental serta daya pikir atas mereka yang dipimpin. (Karyadi, 1983 : 6).

Pemimpin informal ini biasanya timbul sewaktu-waktu yaitu pemimpin yang muncul insidentil dalam kelompok pada situasi tertentu, pemimpin semacam ini biasanya oleh kelompok benar-benar mempunyai peran yang besar terhadap bawahannya karena dirasakan dapat memberi sumbangan-sumbangan yang berharga bagi kelompok itu.

Selain itu White (dikutip oleh Abdulrahman 1982 : 69) mengatakan bahwa pimpinan informal mobilitas sosialnya lebih tinggi dan peranannya cukup banyak untuk berintegrasi dalam kelompoknya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa peranan kepemimpinan informal menjadi sangat penting karena pemegang kunci partisipasi rakyat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pemimpin informal lebih dekat dan langsung hidup ditengah-tengah masyarakat, disamping itu pengaruh unsur-unsur tradisional dan unsur keagamaan lebih dalam tertanam dalam kehidupan mereka, lebih mendengar dan memenuhi apa yang dikemukakan pimpinan informal.

Selanjutnya menurut Kartono (1983 : 6-7), pemimpin informal memiliki ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut : (a) Tidak memiliki jabatan formal, (b) Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan meyakinkannya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok tersebut masih mau meyakini eksistensinya, (c) Tidak mendapat dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, (d) Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa atau imbalan jasa itu diberikan secara suka rela, (e) Tidak dapat dimutusikan dan tidak pernah mendapat promosi, dan tidak memiliki atasan, dan tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu, (f) Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja penilaian orang terhadap dirinya menjadi berkurang.

Dari ungkapan tersebut di atas, mudah dipahami bahwa pemimpin informal tidak mendapat pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mendapat kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikhis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Selanjutnya Budiardjo (1979 : 13) mengatakan bahwa di desa/nagari seringkali alim ulama atau pendeta mempunyai kekuasaan atas umatnya sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di nagari itu.

Hal ini berarti setiap ide atau program pembangunan desa hendaknya memperhitungkan keberadaan pemimpin informal atau tokoh masyarakat, karena dengan melalui kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat maka ide-ide yang akan dilontarkan atau diajukan akan mendapat tanggapan dari masyarakat. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah menerima dan melaksanakan ide-ide tersebut, besar kemungkinannya akan dapat diterapkan untuk masyarakat secara keseluruhan. (Siagian, 1983:18).

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat Nagari, kehadiran tokoh-tokoh masyarakat atau pemimpin informal tersebut sangat diperlakukan karena mereka juga dapat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan nagari. Hal ini bisa dimengerti, karena dalam kehidupan sehari-hari kelompok ini dijadikan tempat bertanya, tempat meminta saran atau petunjuk-petunjuk

dan dalam banyak hal kelompok ini tidak hanya ditempatkan sebagai pemberi legitimasi, tetapi lebih dari pada itu mereka adalah panutan sikap dan tindakan, serta senantiasa diharapkan dapat berbuat nyata bagi kepentingan bersama.

3. Profil Kepemimpinan Informal di Nagari Minangkabau

Menurut Zain Badudu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa ada 3 kepemimpinan di Minangkabau yaitu tungku tigo sajarangan: (1) Ninik Mamak,yaitu orang-orang tua kepala adat di Minangkabau (Sumatera Barat); orang yang paham akan adat istiadat; para penghulu adat, (2) Alim Ulama, yaitu orang-orang alim; para ulama Islam; para kyai, (3) Cadiak Pandai (cerdik pandai), yaitu kaum terpelajar, intelektual. Ketiga pemimpin ini menjadi pemimpin informal dalam sebuah nagari di Minangkabau.

Para pemuka masyarakat ini adalah orang-orang yang dihormati dan dimuliakan, dijunjung tinggi, *diamba gadang*, didahulukan selangkah, ditinggikan saranting, pergi tempat bertanya,pulang tempat bercerita serta sebagai suluh bendang dalam nagari (M. Nasroen, 1957:63).

Tungku tigo sajarangan yang terdiri dari iga unsur kepemimpinana masyarakat Minangkabau bermusyawarah unuk menemukan kesepakatan dalam bentuk kebenaran menyangkut kepemimpinan masyarakat umum. Keputusan tanpa dukungna ketiga unsur kepemimpinan masyarakat tersebut tidak akan memberikan hasil seperti apa yang diharapkan, karena

itu pemimpin yang memberikan hasil apa yang diharapkan. Karena itu pemimpin yang berhasil dalam masyarakat didukung oleh kebijaksanaan dan keputusan (Manan.2002). peranan tungku tigo sajarangan bisa ditafsirkan bahwa masyarakat Minangkabau diikat oleh tiga jenis hukum yaitu hukum adat, hukum islam, dan Undang-Undang (Negara).

Menurut adat istiadat Minangkabau ninik mamak ini juga disebut dengan penghulu yang sering dipanggil *Datuak*.

Kedudukan seorang datuak mempunyai fungsi dan tugas di dalam nagari menurut adat Minangkabau dalam (H. Idrus Hakimi, 2004:81) adalah:

“Urang yang dianjuang tinggi diamba gadang, Nan tak jadi dek kato mufakat dalam lingkungan cupak adat, nan sapayuang sapatagak dalam lingkungan soko turun temurun, pusako jawek bajawek, yang berkewajiban memimpin anak kemenakan menuruik alua nan luruih, Manampuah jalan nan pasa. Mamaliharo harto pusako, kusuik nan kamanyalasaiyan, kok karuah nan ka manjanihan, takalok manjagokan, lupo maingekkan, panjang nan ka mangarek, singkek nan kamauleh, senteng nan kamambilai.” (Orang yang dijunjung tinggi dan dianggap besar, yang tidak akan jadi dengan kata mufakat dilingkungan adat, yang berada dalam satu daerah dan satu kepemimpinan yang diangkat secara turun temurun, yang berkewajiban memimpin anak kemenakan pada jalan yang benar, melakukan segala tindakan sesuai dengan aturan adat, memelihara harta pusaka, menyelesaikan masalah, menjernihkan masalah, mengingatkan, jadi penengah, melengkapi kekurangan).

Hal tersebut dimaksudkan adalah bahwa penghulu atau ninik mamak adalah pemimpin yang dihormati di dalam lingkungan kaumnya dan masyarakat, yang diwarisi turun temurun yang berkewajiban memimpin kemenakan dan masyarakat menurut ketentuan yang benar,

yang memelihara harta kaumnya, menyelesaikan peselisihan dan percekcokan anak kemenakan, memberikan nasehat dan peringatan serta bimbingan kepada anak kemenakannya.

Orang yang telah terpilih untuk menjabat pangkat penghulu di minang kabau dipanggil datuk, setelah melalui persyaratan-persaratan adat yang berlaku dalam daerah setempat. Semua anggota kaum/ masyarakat mematuhi segala perintah dan meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh penghulu (Idrus Hakimi, 2004:63).

Selain penghulu atau ninik mamak. Alim ulama juga mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nagari . Alim Ulama adalah orang yang alim dan tahu tentang agama. Seseorang yang alim adalah orang yang memiliki ilmu agama yang sangat luas dan memiliki iman kuat. Alim ulama ini disebut juga dengan suluah bendang dalam nagari , makasudnya alim ulama berfungsi sebagai penerang kehidupan di masyarakat yang bertugas mengurus persoalan ibadah masyarakat dalam nagari di samping itu, ia juga bertugas untuk mengelola lembaga pendidikan yang diadakan di mesjid-mesjid dan surau-surau. Kalau nama saja alim tak banyak ilmu dan tak kuat iman bisa beraku: banyak alim rusak agama/ banyak cadiak rusak nagari. (Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo; 2009)

Sedangkan Cerdik Pandai adalah orang yang memiliki ilmu dan keahlian dalam masyarakat, seperti guru- guru disekolah, ahli pertanian,

peternakan dan kesehatan. Dari ilmu dan keahlian yang dimiliki mereka itu, mereka ajarkan dan bombing masyarakat, sehingga taraf kehidupannya lebih baik dan dinamik disegala aspek, seperti agama, adat, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan.

Secara adat tugas dan fungsi para cerdik pandai menurut H. Idrus Hakimi (2004:81) adalah: *pagaran tokoh, pamaga korong dengan kampuang, pamaga adat jo agamo, pamaga anak jo kamanakan, pamaga balai jo musajik, pamaga sawah jo ladang, pamaga budi nak jan hilang, sarato malu nan bapakai, ito dek anak kamanakan* (tokoh panutan, pejaga jorong, penjaga adat dan agama, penjaga anak dan kemenakan, penjaga tempat musyawarah dan mesjid, penjaga sawah dan lading, penjaga budi/ tingkah laku jangan sampai hilang, dan mempunyai rasa malu, panutan untuk anak dan kemenakan).

Ketiga unsur kepemimpinan tigo tungku sajarangan tersebut didalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan-pisahkan harus selalu seiring, sejalan dan kompak, sehingga apapun tugas- tugas dalam nagari, apakah tugas adat, keagamaan, sosial budaya, dan pembangunan akan dapat terlaksana dan berjalan lancar.

4. Pembangunan Nagari .

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Hak tersebut diperoleh daerah melalui penyerahan urusan pemerintah dari

pemerintahan atau daerah tingkat atas yang melalui desentralisasi sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah bersangkutan (Djohan Hermansyah, 1990: 52). Pengertian pembangunan menurut beberapa para ahli adalah:

- a. Jhansen (1977:5) pembangunan adalah merupakan suatu proses yang bersifat multidimensional yang struktural dan meliputi segala aspek kemasyarakatan, namun dalam permulaan pembangunan lebih banyak diletakkan pada bidang ekonomi.
- b. Todaro (1977:18) pembangunan adalah merupakan suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial.
- c. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.
- d. Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Ada empat aspek fungsi pembangunan:

- a. Fungsi perencanaan pembangunan.

Suatu rencana adalah suatu keputusan tentang apa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Keputusan membangun dibuat oleh

seluruh masyarakat melalui waki-wakilnya berlandaskan hukum yang ada. Akan tetapi tugas untuk merumuskan keputusan politik itu dalam suatu rencana pembangunan nasional sudah merupakan tugas badan eksekutif, dan sudah bersifat administratif.

b. Perumusan Program Kerja

Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan. Dalam program kerja itu telah ditentukan prioritas kegiatan, sumber pembiayaan, lokasi proyek yang hendak direalisasi, prosedur kerja, koordinasi, sistem pelaporan, tenaga kerja, hasil yang diharapkan, target waktu, prasarana yang diperlukan.

c. Pelaksanaan.

Jika suatu rencana yang realistik, praktis, dan pragmatis telah disusun, dan jika program kerja telah dirumuskan, maka kini tinggallah pelaksanaannya. Seperti dikatakan di atas, ujian terakhir bagi baik buruknya keputusan politik serta rencana yang telah dibuat akan terlihat dalam proses pelaksanaannya. Demikian juga halnya dengan pembangunan.

d. Penilaian hasil-hasil yang dicapai.

Jika hal tersebut di atas telah dilaksanakan, maka untuk membandingkan dan mengukur hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang nyatanya dicapai perlu diadakan penilaian.

Menurut Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat No 2 tahun 2007 menyatakan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batat-batas wilayah tertentu dan berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah propinsi Sumatra Barat.

Berdasarkan hal diatas dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat N0 2 tahun 2008 tentang pemerintahan nagari . Pasal 1 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat N0 2 tahun 2008 menyatakan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batat-batas wilayah tertentu dan berwewenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah propinsi Sumatra Barat.

Nurdin Yakub (1995: 36) menyatakan nagari sebagai berikut: Nagari tidak ada hubungan satu sama lain dan bebas sama sekali. Juga bebas membuat peraturan-peraturan dan bebas menjalankannya, tetapi lembaga-lembaga tetap berlaku untuk semua. nagari-nagari dipimpin oleh penghulu-penghulu secara demokratis berdasarkan kata mufakat merupakan republik-republik kecil.

Dari ungkapan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Nagari adalah kesatuan teritorial dan pemerintahan yang jadi dasar kerajaan dahulu. Tiap nagari mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintahan nagari ini berjalan sangat baik dan demokratis. Kesempatan untuk menyeleweng sedikit sekali, ini disebabkan kontrol yang langsung dilakukan oleh masyarakat melalui penghulu-penghulu mereka. Nurdin Yakub (1995: 36)

Pembangunan di nagari mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut kemajuan dan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia. Dikatakan demikian karena sebagian besar rakyat Indonesia berada di nagari dengan tingkat sosial ekonomi yang sangat rendah, sehingga apabila pembangunan berhasil dilaksanakan di nagari berarti telah mencakup sebagian besar kepentingan penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pembangunan Desa atau nagari perlu ditingkatkan kemampuan pemimpin untuk turut serta secara spontan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang dianggap kurang baik kearah keadaan yang lebih baik. Ndraha (1990 : 111) mengatakan bahwa secara kumulatif, indikator keberhasilan masyarakat adalah sebagai berikut : (1) Sejauh mana kondisi taraf hidup masyarakat berhasil diperbaiki dan ditingkatkan, (2) Sejauh mana peranan masyarakat dalam pembangunan negerinya berhasil digerakan, (3) Sejauh mana kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berhasil ditumbuhkan.

Untuk mewujudkan keadaan seperti yang dikemukakan di atas, disamping diperlukan faktor modal peralatan, juga lebih penting adalah faktor manusianya. Karena manusialah yang sangat menentukan sebagai unsur dinamika pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini Saparin (1977 : 46) mengatakan bahwa faktor manusia sangat menentukan sebagai unsur dinamika pembangunan serta sebagai penerima konsep-konsep kearah kemanusiaan yang luhur serta dasar bagi pembinaan masyarakat yang sehat, terutama yang menyangkut kreativitas, kesadaran akan hak dan wewenang sebagai warga masyarakat, yang mampu menanggulangi dan mengembangkan aspek-aspek kehidupan bersama.

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa unsur manusia sangatlah penting dalam pembangunan karena pada dasarnya manusia adalah obyek dan subyek pembangunan yang harus diperhitungkan. Untuk itu perlu diajak berperan aktif dalam pembangunan.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembangunan nagari merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan memanfaatkan secara maksimal semua sumber yang ada dengan menumbuhkan prakarsa dan peranan masyarakat bagi kepentingan pembangunan itu sendiri.

B. Kerangka konseptual.

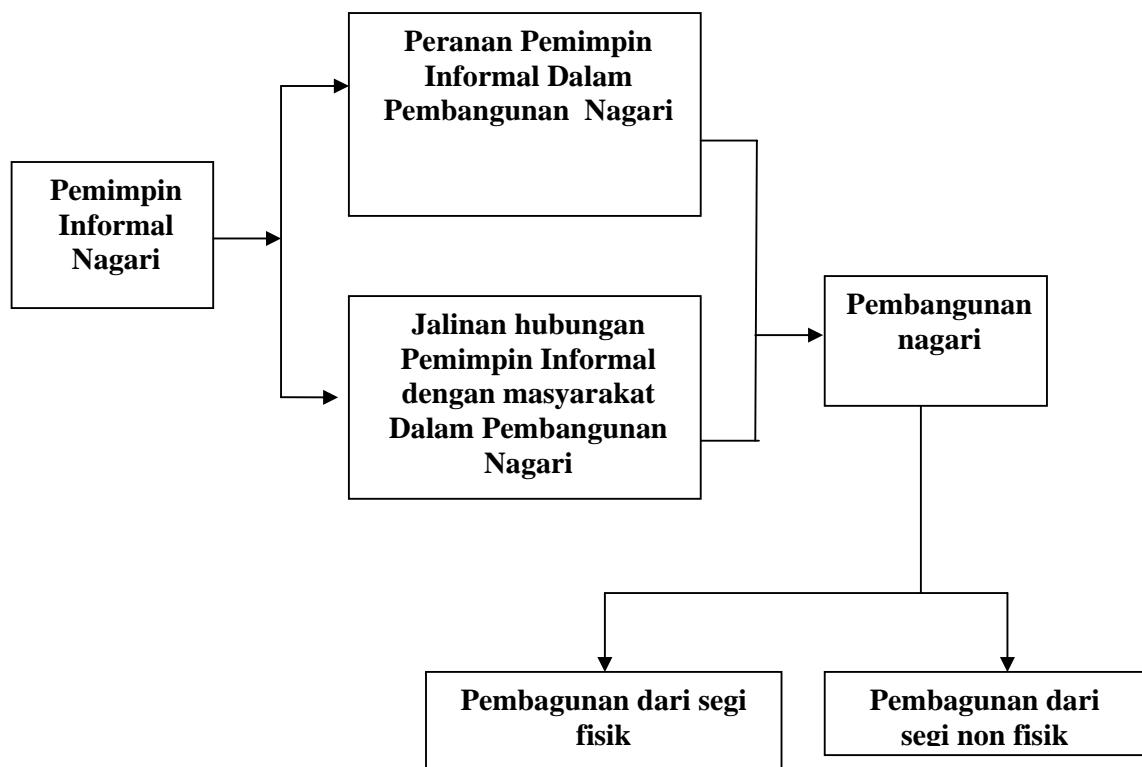
Pembangunan di nagari mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut kemajuan dan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Dikatakan demikian karena sebagian besar rakyat Indonesia berada di nagari dengan tingkat sosial ekonomi yang sangat rendah, sehingga apabila pembangunan berhasil dilaksanakan di nagari berarti telah mencakup sebagian besar kepentingan penduduk nagari .

Dengan demikian untuk menciptakan pembangunan yang baik maka sangat dibutuhkan peranan pemimpin, dimana dalam masyarakat itu selain terdapat pemimpin formal juga ada pemimpin informal yaitu ninik mamak, alim ulama,cadiak pandai. Hubungan baik antara pemimpin informal tersebut dengan masyarakat juga sangat mempengaruhi pembangunan sebuah nagari. Kemudian untuk menjalakan peranannya dalam pembangunan nagari, pemimpin informal juga mendapatkan kendala-kendala baik itu dari dalam ataupun luar dari pemimpin informal itu sendiri.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut.

Gambar 2. 1
Kerangka Onseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan pemimpin informal dalam pembagunan dari segi fisik di Kenagarian Ujung Gading belum berjalan dengan baik. Hal ini pemimpin formal hanya mengikutsertakan pemimpin informal anggota BAMUS selain itu tidak diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan di bidang fisik.
2. Peranan pemimpin informal dari segi non fisik sebagian besar sudah terlihat walau masih ada yang belum terlaksana, cotohnya dalam proses pemberian ide-ide, penyuluhan-penyuluhan, pemberian masukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Hubungan pemimpin informal dengan masyarakat sudah baik walau masih ada juga masyarakat yang tidak mendengarkan nasehat atau tidak menghargai pemimpin informal karna berbagai macam faktor contohnya pendidikan pemimpin informal yang lebih rendah dari pada masyarakat atau perekonomian pemimpin informal yang kurang dibanding masyarakat dan lain-lain.

B. Saran

1. Peranan pemimpin informal dalam pembangunan di bidang fisik harus ditingkatkan. Pemimpin formal harus mengikutsertakan pemimpin informal diluar anggota BAMUS dalam pembangunan segi fisik.

2. Pembangunan masyarakat dalam segi non fisik ditingkatkan lagi terutama dalam hal memberikan masukan, saran, ide-ide untuk kemajuan perekonomian masyarakat.
3. Agar tujuan pembangunan tercapai maka harus ada kerjasama antara pemimpin formal dengan pemimpin informal serta masyarakat. Apabila hubungan yang dijalin baik maka pembangunan akan berjalan dengan baik pula. Masyarakat juga harus bisa menghargai pemimpin-pemimpin nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman.1989. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* Bandung; Alumni.
- Abdurrahman.1982. *Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Djohan Hermansyah.1990. *Problematika Pemerintahan dan Political Lokal*. Jakrta. Bumi aksara.
- Edy Suhardono. 1994. *Teori Peran, Konsep Devirasi dan Implikasinya..* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Harton Paul B. 1999. *Sosiologi Edisi Keenam*. Jakarta; Erlangga.
- Idrus Hakimi.1988. *Adat Istiadat Minang Kabau*.Bandung; PT. Remaja Rosdakarya
- _____,2004. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minang Kabau*.Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya
- Ismail. 1976. *Peranan dalam Pembangunan Desa*. Jakarta ; Sinar Grafika.
- Jhansen. 1970. *Teknik-teknik Pengembangan Masyarakat*. Malang: Institut Pembagunan Masyarakat
- Kartini Kartono. 1983. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Karyadi.1983. *Kepemimpinan(leadership)*.Bogor : Politea
- Koentjaraningrat. 1991. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta ; PT. Gramedia Pustaka Ut.
- Lexy J Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- _____,2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Margono Slamet. 1983. *Mahasiswa dalam pembagunan*. Lampung: Universitas Lampung